

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP
EFEK SAMPING TINDAKAN KEBIRI KIMIA PADA
TERPIDANA**

SKRIPSI



Oleh:
MICHAEL STEVEN ERNANDA
NBI : 1311900252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP
EFEK SAMPING TINDAKAN KEBIRI KIMIA PADA
TERPIDANA**

SKRIPSI



Oleh:
MICHAEL STEVEN ERNANDA
NBI : 1311900252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP EFEK
SAMPING TINDAKAN KEBIRI KIMIA PADA TERPIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

MICHAEL STEVEN ERNANDA

NBI : 1311900252

Dosen Pembimbing:

Hari Soeskandi, S.H., M.H.

NPP : 20310860066

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP EFEK
SAMPING TINDAKAN KEBIRI KIMIA PADA TERPIDANA**

Oleh:

MICHAEL STEVEN ERNANDA

NBI : 1311900252

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 03 Januari 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1426/ST/FH/XII/2022
Tanggal : 20 Desember 2022**

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP : 20310860066

Sekretaris : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.
NPP : 20310210845

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP : 20310200828

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Steven Ernanda
NBI : 1311900252
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal *BUREAUCRACY JOURNAL Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance* dengan judul:

**“Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Efek Samping Tindakan Kebiri
Kimia Pada Terpidana”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 16 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,

Michael Steven Ernanda

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Steven Ernanda

NBI : 1311900252

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal *BUREAUCRACY JOURNAL Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance* dengan judul:

“Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Efek Samping Tindakan Kebiri Kimia Pada Terpidana”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 16 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Michael Steven Ernanda

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Steven Ernanda
NBI : 1311900252
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**“Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Efek Samping Tindakan Kebiri
Kimia Pada Terpidana”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 16 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,

Michael Steven Ernanda

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Steven Ernanda
NBI : 1311900252
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Efek Samping Tindakan Kebiri
Kimia Pada Terpidana”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,

Michael Steven Ernanda

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, dari pihak orang tua, keluarga dan sahabat. Serta dipersembahkan untuk almamater saya tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP EFEK SAMPING TINDAKAN KEBIRI KIMIA PADA TERPIDANA” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi hikmat dan karuniannya pada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
2. Hari Soeskandi S.H.,M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Agaw dan Waem yang sangat luar biasa mensupport perkuliahan saya.
4. (ALM) Papa, Mama, serta Kakak yang memberi kasih sayang, dukungan, dan do'a yang tiada henti untuk kelancaran dalam perjalanan hidup saya, salah satunya penulisan Skripsi ini.
5. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H., CLA., CMC. sebagai Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan dan bantuan untuk bidang ilmu hukum kesehatan sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan inspirasi.
9. Dr.Syofyan Hadi SH., M.H. sebagai Dosen Wali Akademik yang telah mengarahkan penulis untuk pengambilan matakuliah dari awal semester 1 (satu) hingga semester 7 (tujuh), banyak ilmu dan nasehat yang tidak dapat dilupakan oleh penulis.
10. Dan tak lupa teman-teman saya yang senantiasa membantu saya dalam perkuliahan dan juga pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat. dalam setiap tahunnya. Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap belum efektif untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perubahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak hukuman kebiri kimia. Hukuman ini menjadi kontroversial di masyarakat terkait pemberlakuan, efektivitasnya dan efek samping nya yang dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman yang bisa menjadi kerugian pada kesehatan terpidana dikarenakan efek samping dari obat dan suntikan yang digunakan untuk eksekusi kebiri kimia, untuk hal ini pemerintah seyogyanya memperhatikan segala aspek dari efek samping kebiri kimia yang menyiksa hingga mengancam nyawa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. dalam pembentukan aturan kebiri kimia belum memenuhi pembentukan aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan kebiri kimia yang secara ideal harus mempertimbangkan *necessity, adequacy, legal certainty, actuality, feasibility, verifiability, enforceability, dan provability*. Dari delapan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan norma hukum pidana hukuman kebiri kimia hanya sesuai dengan kriteria *legal certainty* bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar, tidak menimbulkan penafsiran dan kekosongan aturan.

Kata Kunci : Kebiri kimia, pertanggungjawaban, kekerasan seksual pada anak, kekosongan hukum

ABSTRACT

Cases of sexual violence against children in Indonesia are a big problem faced by society. in every year. Sexual violence against children has increased quite significantly. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which contains punishments for perpetrators of sexual violence against children is considered not to be effective in providing a deterrent effect to the perpetrators. Following up on this matter, the government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The Perppu was later passed into Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Becomes Law. The changes contained in the law are aggravating penalties for perpetrators of sexual violence against children under chemical castration. This punishment has become controversial in society regarding its implementation, effectiveness and side effects which are considered inconsistent with human rights (HAM). Punishments that can be detrimental to the defendant's health due to the side effects of the drugs and injections used for the execution of chemical castration, in this case the government should pay attention to all aspects of the side effects of chemical castration which are torturous to life threatening. The research method used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches with primary, secondary and non-legal legal sources. The approach method used is the statutory approach and the conceptual approach. in the formation of chemical castration rules it has not fulfilled the formation of rules governing procedures for the implementation of chemical castration which ideally must consider necessity, adequacy, legal certainty, actuality, feasibility, verifiability, enforceability and provability. Of the eight criteria that must be met in establishing criminal law norms, chemical castration punishment is only in accordance with the criteria of legal certainty, namely that the law must really contain clear and real principles, not vague, not cause interpretation and void of rules.

Keywords : *Chemical castration, accountability, sexual violence against children, legal vacuum*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	9
KATA PENGANTAR	10
ABSTRAK	12
ABSTRACT	13
DAFTAR ISI	14
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Manfaat Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum..	Error! Bookmark not defined.
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Penegakan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Tanggung gugat pemerintah atas efek samping kebiri kimia.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Umum	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Kekerasan Seksual Pada Anak	Error! Bookmark not defined.
2.4 Pidana Tambahan.....	Error! Bookmark not defined.

2.5	Kebiri Kimia	Error! Bookmark not defined.
2.5.1	Hak Asasi Manusia.....	Error! Bookmark not defined.
2.5.2	Efek Samping Obat (ESO)	Error! Bookmark not defined.
2.5.3	Rehabilitasi	Error! Bookmark not defined.
2.6	Kekosongan Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
3.1	Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Efek Samping Yang Ditimbulkan Dari Obat Dan Suntikan Yang Digunakan Untuk Kebiri Kimia	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	Dasar Hukum Kebiri Kimia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.2	PP No. 70 Tahun 2020 Sebagai Peraturan Pelaksana Kebiri Kimia Sebagaimana yang Diamanatkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.3	Implementasi kewajiban Pemerintah Dalam Merealisasikan Hak Atas Kesehatan pada terpidana.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.4	Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Efek Samping Kimia Dengan Mempertimbangkan Aspek HAM	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
4.1	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.